# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik, sinergitas dan saling menguntungkan.

Pada kenyataannya daerah memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menghambat upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari sumber serta memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten.

UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 1 (1) : Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara.

Salah satu bentuk kerjasama dan kemitraan adalah kerjasama *sister province,* dimana daerah, dengan mempertimbangkan potensinya dapat mengajukan, mengusulkan dan melakukan kerjasama dengan provinsi di negara lain, untuk kepentingan pembangunan dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Pemilihan mitra kerjasama dari luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan, diantaranya kesamaan kultur, demografi dan geografi; serta adanya kepentingan lain seperti perdagangan dan alih teknologi, yang dirasa belum cukup terakomodasi jika kerjasama dilakukan dengan pihak-pihak lain dalam tataran domestik. Hal ini sesuai dengan UU nomor 24 tentang Perjanjian Internasional juga dengan Permendagri no. 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri dan Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01 tahun 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

Selain hal – hal tersebut di atas, yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah:

1. Telah dilakukan penjajakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai pada tahun 2007 – 2008 dalam bidang yang terkait dengan pengembangan sosial ekonomi masyarakat, yaitu kerjasama bidang pendidikan tinggi, kebudayaan, industri kecil dan menengah, perdagangan serta pengembangan pariwisata. Rencana kerjasama telah dituangkan dalam bentuk LoI (pernyataan kehendak) *Sister Province* namun karena kerusuhan di Bangkok, kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan.
2. Sesuai dengan misi KBRI yang akan mengoptimalkan setiap peluang kerjasama antar masyarakat kedua negara termasuk realisasi kerjasama “*people to people contact*” di bidang pendidikan, pariwisata, perdagangan dan bidang lainnya dengan lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia untuk meningkatkan citra positif Indonesia dengan merencanakan kegiatan ke depan adalah mendorong pelaksanaan kerjasama antar Provinsi yang telah menjalin penjajakan dengan cara mengefektifkan kerjasama *Sister Province* yang telah ada dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi (TTI), pertanian dan budaya serta pendidikan di kedua Negara yang bersifat komplementari.
3. Pada tanggal 9 – 10 Agustus 2010 dilakukan Rapat Inter Kementerian dalam rangka persiapan *The 7th Joint Commission Meeting* RI – Thailand dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat diundang untuk menjadi peserta pada Kelompok Kerja bidang Sosial Budaya dalam rapat tersebut terungkap keinginan Kementerian Luar Negeri untuk menginisiasi kembali rencana *Sister Province* antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai, Thailand.
4. Pada tanggal 18 Oktober 2011 di Bandung, KBRI Thailand dengan dipimpin oleh Duta Besarnya, Bapak Mohammad Hatta melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Bapak Gubernur menyambut baik tawaran Duta Besar RI untuk Thailand untuk kembali membangun kerjasama dengan Provinsi Chiang Rai. Kedua wilayah dinilai memiliki kecocokan potensi utamanya dalam bidang pertanian, pengembangan pariwisata, pendidikan dan pengembangan UKM. Tiga hal yang menjadi keunggulan provinsi ini adalah bidang perkebunan (memiliki ribuan hektar kebun kopi yang sudah diekspor di berbagai Negara), Chiang Rai berada di kawasan *Golden Triangle* berbatasan langsung dengan negara: Kamboja, Laos dan Myanmar serta memiliki perdagangan perbatasan dengan 3 (tiga) negara tetangga yaitu China Selatan, Myanmar dan Laos dikenal juga dengan *Chiang Rai Border Trade,* hal ini bisa menjadi satu keuntungan karena dengan menjalin kerjasama dengan Chiang Rai maka produk – produk baik barang dan jasa Jawa Barat bisa masuk ke 3 (tiga) negara tersebut karena selama ini Provinsi Chiang Rai menjadi hub bagi negara – negara tersebut. Memang harus dipelajari lebih lanjut apa yang menjadi keunggulan dari produk – produk Jawa Barat yang dibutuhkan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara lainnya karena hampir bisa dipastikan barang – barang primer dan sekunder dipenuhi oleh produk – produk dari Negara China.
5. Selain itu Provinsi Chiang Rai juga kaya akan tanaman obat sehingga menjadi pusat pengobatan tradisional herbal di Thailand. Dalam bidang pertanian Jawa Barat bisa bertukar pengetahuan (*sharing knowledge*) dalam hal mengelola hasil panen dan meningkatkan produksi tanaman pangannya. Selain itu, hal yang bisa dipelajari dari Chiang Rai adalah cara memperluas pasar hal ini tidak lepas dari lokasi Provinsi ini yang menjadi hub bagi RRC dan negara – negara di Asia Tenggara.

Adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri dalam rangka penciptaan jejaring dan pemenuhan kebutuhan serta sebagai salah satu cara dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, maka dianggap perlu untuk dilakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Hanya saja dalam pemilihan mitra kerjasama harus dilakukan secara hati – hati dikarenakan kerjasama luar negeri bukan hal yang diturunkan untuk menjadi suatu kewenangan daerah akan tetapi daerah diberi celah untuk bisa memanfaatkan kerjasama luar negeri sebagai bentuk *total diplomacy.*

**Terkait dengan Pemilihan ini Indonesia dengan Thailand Adapun Beberapa perbandingan Sebagai Berikut :**

* Hubungan bilateral RI – Thailand secara resmi dimulai sejak 7 Maret 1950;
* Kedua Negara sudah mencapai tahap hubungan yang matang tidak hanya sebagai *friends* tetapi *trusted friends*. Sebagai contoh : Indonesia pernah meminta Thailand untuk mewakili kepentingannya di Portugal saat krisis Timor Timur. Sebaliknya Thailand pernah meminta bantuan Indonesia untuk memberikan dukungan terkait dengan pembahasan masalah minoritas muslim di Thailand di siding Dewan Menlu OKI;
* Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, keeratan hubungan kedua Negara semakin meningkat, saling mendukung dan saling mengisi baik dalam lingkup bilateral, regional khususnya ASEAN maupun multilateral;
* Perkembangan hubungan bilateral kedua Negara dalam berbagai aspeknya secara berkala dievaluasi dan lebih dikembangkan melalui mekanisme *Joint Commission Meeting.*

Kerjasama RI – Thailand yang dimungkinkan menjadi payung bagi rencana kerjasama Jawa Barat – Chiang Rai:

1. Bidang Ekonomi dan Perdagangan
2. Bidang pertanian
3. Bidang penerangan, sosial budaya dan pendidikan
4. Bidang Pariwisata
5. Kerjasama di bidang pendidikan

Atas dasar hal tersebut penulis mengajukan judul skripsi mengenai **“Kerjasama Pemerintah Jawa Barat – Pemerintah Provinsi Chiang Rai di Bidang Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan wisatwan ke Dua Negara (Indonesia-Thailand)**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah provinsi Jawa Barat melakukan kerja sama sister provinsi dengan provinsi Chiang Rai?
2. Bagaimana Jawa Barat melakukan kerjasama Sister Provinsi dengan Chiang Rai adalah?
3. **Pembatasan Masalah**

Agar permasalahan yang diuraikan diatas tidak menyebar kemana-mana maka penulis berusaha mengerucutkan masalah dengan jalan membatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah dengan memfokuskan terhadap beberapa point yaitu kerjasama Sister Provinsi dan Pariwisata di kedua negara.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi adalah **“Sejauhmana kontribusi kerjasama Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai Sister Provinsi dalam membantu meningkatkan pariwisata di Kedua Negara?**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
3. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama Jawa Barat dalam melakukan peningkatan pendidikan dan pariwisata
4. Untuk mengetahui upaya apakah yang akan di lakukan oleh Jawa Barat dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan buruknya akomodasi pariwisata
5. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi oleh Jawa Barat dalam membantu meningkatkan pendidikan dan pariwisata
6. **Kegunaan Penelitian:**
7. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah Internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalitis suatu permasalahan khususnya dibidang kerjasama regional ASEAN dalam meningkatkan Pendidkan dan Pariwisata.
8. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
9. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata – 1 (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
2. **Kerangka Teoritis**

Di dalam pergaulan internasional setiap negara tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antar negra yag melintasi batas negara dimana setiap negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan negara lain. Juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap kelangsungan umat manusia di muka bui ini, untuk itu diperlukan hubungan yang komprehensif dimana memiliki tingkat kesepahaman antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena hubungan tersebut sangat kompleks diamnana setiap segi dari hubungan ini memerrlukan koordinasi yang tidak sederhana, karena bangsa lain juga memiliki kedaulatan. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain bisa menimbulkan konflik karena pada umunya setiap negara yang terlibat dalam menjalin hubungan mempunyai kepentingan untuk mengajar kepentingan nasional masing-masing negara. Terlibatnya suatu negara dalam masalah didasarkan apabila negara mempunyai konflik dan juga negara tersebut mempunyai kepentingan nasional. Hubungan internasional yang menyangkut bebrbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan yaitu: kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan konflik (conflict) antar negara dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh duniua dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.

Pengertian diplomasi menurut wikipedia adalah :

‘’seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan’’ [[1]](#footnote-1)

Sedangkan menurut Nicholson diplomasi adalah :

Kata “diplomasi” diyakini berasal dari kata yunani “diploun” yang berarti “melipat”. “pada masa kekaisaran romawi semua paspor yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan logam ini disebut “diplomas”. Selanjutnya kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khusunya yang memeberikan hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing diluar bangsa romawi. Karena perjanjian-perjanjian ini semakin bertumpuk, arsip kekaisaran menjaid beban dengan dokumen-dokumen kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dilipat dan diberikan dalam cara khusus. Oleh karena itu dirasa perlu untuk mepekerjakan seseorang yang terlatih untuk mengindeks, menguraikan dan memeliharanya. Isi surat resmi negara yang dikumpulkan, disimpan di arsip, yang berhubungan dengan hubungan interansional dikenal pada zaman pertengahan sebagai diplomaticus atau diplomatique. Siapapun yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik res diplomatique atau bisnis diplomatic.[[2]](#footnote-2)

Definisi dari Hubungan internasional juga dikemukakan oleh KJ. Holsti dalam buku Politik Internasional Suatu Kerangka analisis yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda sebagai berikut :

“Istilah Hubungan Internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.[[3]](#footnote-3)

Konsep dalam Hubungan Internasional dibagi menjadi tiga tingkatan antara lain:

1. Level sistemik atau lingkungan internasional

•Kekuasaan: dideskripsikan sebagai tingkat sumber daya, kapabilitas dan pengaruh dalam persoalan internasional. Konsep ini dibagi menjadi dua yaitu kekuasaan keras yang bersifat memaksa (seperti penggunaan kekuatan militer) dan kekuasaan lunak yang mencakup ekonomi, diplomasi dan pengaruh budaya (seperti penerapan embargo ekonomi).

•Interdependensi: dikarakterkan oleh meningkatnya saling ketergantungan, baik tanggung jawab terhadap satu sama lain maupun ketergantungan terhadap pihak lain. Hal ini tercermin dari meningkatnya globalisasi, terutama dalam hal interaksi ekonomi internasional.

2. Level unit atau negara

•Rezim: rezim suatu negara dapat menentukan cara negara tersebut berinteraksi dengan negara lain dalam sistem internasional. Teori Perdamaian Demokratis mengemukakan bahwa hakikat demokrasi berarti bahwa negara-negara demokratis tidak akan saling berperang kecuali dengan alasan-alasan yang benar dan bahwa demokrasi mendorong kepercayaan dan penghargaan terhadap satu sama lain. Sedangkan komunisme menjustifikasikan suatu revolusi dunia, yang juga akan menimbulkan hidup berdampingan secara damai, berdasarkan masyarakat global yang proletar.

• Status Quo dan Revisionisme : negara-negara dapat diklasifikasikan menurut apakah mereka menerima status quo (keadaan yang ada) atau merupakan revisionis (menginginkan perubahan).

• Agama : agama dianggap dapat memiliki pengaruh terhadap cara negara bertindak dalam sistem internasional. Agama dianggap sebagai prinsip pengorganisasi terutama bagi negara-negara islam, sedangkan sekularisme sebaliknya, dengan pemisahan antara negara dan agama, bertanggung jawab atas tradisi liberal.

3. Level sub unit atau individu

• Faktor psikologis dalam HI : mengamati peran berbagai kepribadian dalam proses pembuatan keputusan dapat memiliki suatu daya penjelas (seperti mispersepsi di antara berbagai aktor). Hal ini berpengaruh terhadap keputusan kebijakan luar negeri suatu negara.

• Politik birokrat : mengamati peran birokrasi dalam pembuatan keputusan dan menganggap berbagai keputusan sebagai hasil pertarungan internal birokratis yang dibentuk oleh berbagai kendala.

• Kelompok keagamaan, etnis dan yang menarik diri : mengamati konflik/perang yang berkaitan dengan agama, etnis dan aktor lain yang tidak menganggap diri mereka cocok dengan batas-batas negara yang pasti. Hal ini terutama bermanfaat dalam konteks dunia negara-negara lemah pra-modern.

• Ilmu, teknologi dan hubungan internasional : mengamati pengaruh HI pada perkembangan teknologi, lingkungan, bisnis dan kesehatan dunia.[[4]](#footnote-4)

Mengenai kerjasama internasional Dr. Budiono membaginya kedalam empat bentuk, yakni :

1. Kerjasama Global

Adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama merupakan dasar utama bagi kerjasama global. Sejarah kerjasama global dapat di telusuri kembali mulai dari terbentuknya kerjasama multilateral.

2. Kerjasama regional

Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Kerjasama tersebut biasa berada dalam bidang pertahanan, hukum, kebudayaan dan sebagainnya. Lebih lanjut menurut Dr.Budiono, organisasi kerjasama regional dewasa ini merupakan masalah yang amat luas dan rumit. Adapun yang menentukan dalam kerjasama regional selain kedekatan geografis, kesamaan, pandangan bidang politik dan kebudayaan maupun perbedaan struktur produktifitas ekonomi juga ikut menentukan pula apakah kerjasama tersebut dapat di wujudkan. Kerjasama regional merupakan salah satu alternative yang dapat di pergunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan.

3. Kerjasama Fungsional

Kerjasama fungsional permasalahan maupun metode kerjasamanya menjadi semakin kompleks di sebabkan oleh semakin banyaknnya berbagai lembaga kerjasama yang ada. Walaupun terdapat kompleksitas dan banyak permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama fungsional baik di bidang ekonomi maupun sosial, untuk pemecahannya di perlukan kesepakatan dan keputusan politik. Disini terlihat bahwa kerjasama fungsional tidak bias di lepaskan dari power. Kerjasama fungsional tidaklah berjalan mulus sebagaimana di harapkan. Sebagai akibat dari adanya kekuatan atau kelemahan yang spesifik pada beberapa negara maka persaingan tidak dapat dicegah yang kemudian menghasilkan apa yang di sebut oleh para ahli ekonomi internasional sebagai kerjasama yang kompetitif yang merupakan lawan dari kerjasama yang komplementer.

4. Kerjasama Ideologi

Dalam hal perjuangan atau kerjasama ideologi batas-batas teorial tidak relevan. Berbagai kelompok kepentingan berusaha mencapai tujuannya dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka diforum globa.[[5]](#footnote-5)

Menurut WTO (1999:5) yang dimaksud dengan Pariwisata adalah:

a. Tourism – activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes;

Pariwisata dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Perjalanan wisata ini berlangsung dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun secara berturut-turut untuk tujuan bersenang-senang, bisnis dan lainnya.

b. Visitor – any person traveling to a place other than that of his/her usual environ-ment for less than 12 consecutive months and whose main purpose of travel is not to work for pay in the place visited; Dapat diartikan pengunjung adalah siapa pun yang melakukan perjalanan ke daerah lain di luar dari lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut dan tujuan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di daerah tersebut.

c. Tourist – overnight visitor, visitor staying at least one night In a collective or private accommodation in the place visited;

Wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau pengunjung yang tinggal di daerah tujuan setidaknya satu malam di akomodasi umum ataupun pribadi.

d. Same day visitor – excursionists,visitor who does not spend the night in a collective or private accommodation in the place visited;

Pengunjung harian adalah ekskurionis, pengunjung yang tidak bermalam di akomodasi umum atau pribadi di daerah tujuan.[[6]](#footnote-6)

Sedangkan menurut ahli-ahli lainnya pengertian pariwisata dalam Idris Abdurrachmat dan E Maryani (1998 : 73-73) adalah sebagai berikut :

a. Mc Intosh dan Goelder : Pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung, termasuk di dalamnya berbagai akomodasi dan katering yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung.

b. James J. Spillane : Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara, dilakukan perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dalam dimensi sosial budaya alam dan ilmu.

c. Gluckman : Keseluruhan hubungan antara manusia yang hanya berada sementara waktu dalam suatu tempat dengan manusia yang tinggal di tempat itu.

d. Undang-undang RI no. 9 tahun 1990 : Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur definisi dasar dari kepariwisataan sebagai berikut :

a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

c. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang  terkait di bidang tersebut.

d. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan  penyelenggaraan pariwisata.

e. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa  pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.[[7]](#footnote-7)

Dalam pelaksanaannya setiap negara atau daerah provinsi memerlukan kerjasama, karena setiap negara atau daerah provinsi tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakan stabilitas keamanan. Karena pada hakekatnya kerjasama untuk menciptakan tujuan bersama. Teuku may Rudy dalam bukunya Administrasi dan *Organisasi Internasional* mengenai kerjasama internasional, bahwa :

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan disadari struktur organisasi yang jelasa dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”[[8]](#footnote-8)

Adapun pengertian regional menurut Louis J. Cantory dan Steven L. Spiegel dalam bukunya The International Politics of Region yang dikutip T. May Rudy dalam bukunya Study Kawasan Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia sebagai berikut :

“Regional dapat diartikan satu kawasan du dunia, dimana terdapat kedekatan negara secara geografis, aktifitas anggota kawasan (baik menentukan kebijakan luar negeri masing-masing kawasan tertentu mungkin mempunyai kemampuan ektra regional. Prioritas utama keterlibatan dalam hubungan luar negeri adalah kawasan yang ditempatinya. Dalam kondisi normal mereka meraih dan mempertahan posisi permanent di wilayah mereka sendiri”.[[9]](#footnote-9)

Mojang Jajaka dalam Pengembangan Pariwisata Jawa Barat :

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Karena memiliki keunggulan kekayaan alam dan keragaman budaya dibanding negara lain. Menyadari potensi wisata yang begitu kaya dan adanya keyakinan akan pentingnya peranan pariwisata bagi ekonomi Indonesia, maka pemerintah bertekad untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu industri penghasil devisa bagi negara. Dalam mendukung pengembangan pariwisata ini pemerintah Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat mengadakan kegiatan Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap nilai – nilai seni budaya dan berperan secara aktif dalam mempromosikan pariwisata daerah khususnya Jawa Barat. Dalam laporan kerja praktek ini di bahas mengenai Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat, Proses Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat sebagai Duta Pariwisata dan Tugas Mojang dan Jajaka sebagai Duta Pariwisata Jawa Barat. Dengan kegiatan Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat ini merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan rasa sadar wisata, kepedulian sosial dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata adalah adanya keinginan masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Pasanggiri Mojang dan Jajaka Jawa Barat di anggap sangat tepat sebagai salah satu usaha pengembangan pariwisata di Jawa Barat dan merupakan Event yang perlu di kembangkan dan dibudayakan.[[10]](#footnote-10)

Misi Disparbud Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai pusat budaya dan destinasi wisata berkelas dunia :

meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi local, melestarikan aset budaya local, mengefektifkan seni dan budaya sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan kepariwisataan Jawa Barat dalam bingkai kearifan lokal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata.[[11]](#footnote-11)

Blue Print Pengembangan Wisata Agro Jawa Barat :

Potensi kegiatan pariwisata di Jawa Barat sangat ditunjang oleh perkembangan berbagai sektor terkait, salah satunya pertanian. Keindahan alam lahan pertanian dan perkebunan di Jawa Barat, dengan budaya pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya, menjadikan pertanian sebagai salah satu daya tarik wisata yang biasa dikenal dengan wisata agro. Salah satu upaya untuk mendorong berkembangnya wisata agro adalah dengan menyusun Blue Print Pengmebangan Wisata Agro Jawa Barat. Konsep pengembangan pariwisata agro Jawa Barat mengacu pada konsep : GREEN AGROTOURISM, yang bermakna pengembangan pariwisata agro yang bermanfaat bagi pengembangan sektor pertanian maupun pariwisata, bermanfaat bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, wisatawan, maupun lingkungan secara berkelanjutan.[[12]](#footnote-12)

Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa mendorong penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Thailand dengan isi sebagai berikut :

Kedua Menlu sepakat memperkuat kerangka kerja sama bilateral antara Indonesia-Thailand, melalui penyelenggaraan JCM setiap tahunnya. Mereka juga sepakat terus meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara, dengan mengidentifikasi peluang-peluang dan memfasilitasi hubungan dunia usaha kedua negara yang lebih erat. Pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Thailand telah berlangsung sejak 1992 sebagai mekanisme bilateral untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara yang secara diplomatik terjalin sejak 1950. Hubungan Indonesia dengan Thailand telah berlangsung dengan erat di berbagai bidang, antara lain direfleksikan oleh frekuensi dan intensitas saling kunjung pejabat tinggi kedua negara, serta peningkatan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pjariwisata. Sementara peningkatan signifikan arus wisatawan kedua negara selama beberapa tahun terakhir telah membuka peluang kerjasama melalui promosi bersama serta peningkatan akses dan konektivitas antara kedua negara.ndonesia merupakan mitra dagang kedua terbesar bagi Thailand di antara 9 negara ASEAN lainnya, serta kedua negara telah menjalin hubungan kerjasama erat termasuk saling dukung di berbagai forum internasional. [[13]](#footnote-13)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia merintis kerja sama dengan Thailand di bidang pendidikan perhotelan dan pariwisata. Program kerja sama ini meliputi magang, pertukaran mahasiswa, dan kursus singkat online :

Rencananya, dalam kerjasama ini akan digelar program magang dan pertukaran pelajar antara Prince of Songkhla University dengan STP Sahid dan Politeknik Negeri Bali di beberapa bidang tourism management seperti front office dan house keeping. Prince of Songkhla University akan mengirimkan sebanyak 12 mahasiswanya ke STP Sahid dan Politeknik Negeri Bali pada tahun ini begitu juga sebaliknya. STP Sahid dan Politeknik Negeri Bali akan mengirimkan masing-masing enam mahasiswanya ke Prince of Songkhla University Phuket Campus. Semua pembiayaan selama belajar akan dibebaskan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing pihak akan menyediakan dormitory untuk para mahasiswa, juga bertanggungjawab untuk membuat instrument monitoring, supervisi, dan evaluasi sesuai dengan standar masing-masing institusi. Dalam hal ini, host partner bertanggungjawab untuk mensupervisi siswa yang ada dalam program tersebut dengan menggunakan instrument yang telah dibuat.[[14]](#footnote-14)

1. **Asumsi**
2. Kepariwisataan Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dan dapat diandalkan.
3. Namun perkembangan kepariwisataan ini harus didukung oleh pola pengelolaan internet dalam rangka menyediakan informasi yang menyeluruh bagi wisatwan.
4. Didalam kepariwisataan, pengembangan e-Tourism berbasis online booking perlu menjadi perhatian Jawa Barat
5. E-tourism juga dapat mengurangi travel agen luar, sehinggga semua pendapatan dari pengeluaran wisatawan menajdi hak pariwisata Jawa Barat.
6. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahn di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:**“Kerjasama Pemerintah Jabar dan Pemerintah Chiang Rai dibidang pariwisa dalam lingkup Sister Provinsi berpengaruh positif terhadap wisata Jawa Barat yang terlihat dengan meningkatkan kunjungan wisatawan Thailand ke Indonesia (Jawa Barat)**

1. **Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Konsep Analisis** |
| Variabel Bebas; Jika Kerjasama yang ditegaskan oleh adanya ASEAN Security Community dengan konsep Plan of Action Dilakukan Oleh Semua Negara Anggota ASEAN Secara Optimal. | 1. 1. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam ARF ( ASEAN Regional Forum)   2. Kerjsama ASEAN di bidang dan pariwisata. | 1. ARF (*ASEAN Regional Forum*) mendasarkan kinerjanya pada tiga bentuk mekanisme, yaitu: pertama, Membina salin percaya (*Confidence Building* *Measures/CBMs*), Kedua, Diplomasi Preventif (*Preventive Diplomacy*), Ketiga, Kerjasama keamanan dan politik.  (data dari *Visist Indonesia Year* Tahun 2012)   1. 2.*.* Pada tanggal 9 – 10 Agustus 2010 dilakukan Rapat Inter Kementerian dalam rangka persiapan The 7th Joint Commission Meeting RI – Thailand dimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat diundang untuk menjadi peserta pada Kelompok Kerja bidang Sosial Budaya dalam rapat tersebut terungkap keinginan Kementerian Luar Negeri untuk menginisiasi kembali rencana Sister Province antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai, Thailand. (data dari TERM OF REFERENCE (TOR)   Dibuat dalam rangka revitalisasi kerjasama dengan Provinsi Chiang Rai, Thailand, Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama  Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ) |
| Variabel Terikat: Maka Pariwisata Jawa Barat Akan Meningkat. | 1. 1. Jawa Barat terus menempatkan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri. 2. 2. Tindakan-tindakan Jawa Barat dalam mengatasi masalah pariwisata, dengan mengedepankan pariwisata hijau, dan bersih | 1. 1. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah KTT ke-9 ASEAN di Bali, 7-8 Oktober 2003, dengan tema *Towards an ASEAN Community: ASEAN Security, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-cultural Community.* 2. 2. Kesepakatan ini akan meningkatkan sektor pariwisata Jawa Barat |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**AFTA**

**ARF**

**Social and Cultural Community**

**Security Community**

**Kerjasama  
Regional**

**ASEAN**

**Economic Community**

**Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama  
Provinsi Jawa Barat**

**Pemerintah Provinsi Jawa Barat**

**Pariwisata Indonesia**

## Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. **Tingkat Analisis**
2. Analisis Induksionis, yang unit analisisnya pada tingkatan yang lebih tinggi.
3. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif analisis dan metode historis analisis.

1. Metode deskritif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang deawasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskritif analisis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta mengalisis fenomena yang ada untuk mengambarkan serta rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interprestasi data-data tersebut.
2. Metode historis analisis, yaitu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahan yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan dan mengukapkan peristiwa masa lalu, metode penelitian ini digunakan dan mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, bulletin-bulletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
3. Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Provinsi Jawa Barat (Gedung Sate)

Jalan. Diponegoro No.22 Bandung 40115

1. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung

Jalan. Lengkong Besar No.68 Bandung

1. Perpustakaan Univeritas Katolik Parahyangan

Jalan. Ciumbeluit, Bandung

1. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung

Jatinangor, Bandung

1. **Lamanya Penelitian**

Penulis Melakukan Penelitian diperkirakan sejak bulan November sampai Januari 2014/2015. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam table pada halaman berikutnya.

### Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan Penelitian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **Tahap Persiapan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Konsultasi judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Pengajuan judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Penyusunan Proposal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Pengurusan Izin Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Pengumpulan Data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Analisis data** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Kegiatan akhir** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Penyusunan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c. Perbaikan hasil draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d. Sidang Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

**BAB II: KERJASAMA PEMERINTAH JAWA BARAT – PEMERINTAH PROVINSI CHIANG RAI**

Bab ini menguraikan tentang hubungan kerjasama regional Pariwisata di kedua Provinsi

**BAB III: PENINGKATAN WISATAWAN KE DUA NEGARA (INDONESIA – THAILAND)**

Bab ini membahas tentang aspek-aspek yang menjadi penunjang dalam meningkatkan Pariwisata di kedua Provinsi dalam lingkup Kepentingan kedua negara, dan membantu meningkatkan sektor pariwisata serta strategi Jawa Barat dalam konteks ekonomi regional

**BAB IV: STRATEGI DAN KERJASAMA JAWA BARAT DAN CHIANG RAI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN PAWISATA**

Bab ini membahas tentang langkah-langkah Chiang Rai dalam membantu meningkatkan pendidikan dan pariwisata di Jawa Barat sebagai wadah kerjasama Ekonomi dan Sosial Negara-negara Asia Tenggara juga kendala-kendala ASEAN dalam membantu meningkatkan pendidikan dan pariwisata Indonesia serta strategi kebijakan Indonesia dalam konteks kerjasama regional

**BAB V: KESIMPULAN**

Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian.

1. <https://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi> pada tanggal 28-November-2015 .jam 21.48 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://ardilaputri.wordpress.com/2014/12/15/pengertian-diplomasi/> pada tanggal 28-November-2015 .jam 21.48 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. K.J Holsti, Politik Internasional; *Suatu Kerangka Analisis,* Bina cipta, Bandung, 1978 hal 26-27. [↑](#footnote-ref-3)
4. http://aryfiarno.blogspot.com/2012/09/konsep-hubungan-internasional.html diakses pada tanggal \9¬-3-2015 jam 13.16 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. Drs.R.Soeprapto,Hubungan Internasional : system Interaksi dan Perilaku, PT.RajaGrafindo Persada ,Jakarta,1997,hal 181-186. [↑](#footnote-ref-5)
6. http://konsepblackbook.blogspot.com/2013/04/konsep-dasar-pariwisata.html diakses pada tanggal 9-3-2015 jam 13.18 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. http://www.putussibau.com/berita/165-kdk.html diakses pada tanggal 9-3-2015 jam 13.18 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. T. May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, Eresco, Jakarta, 1994, hal. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. T. May Rudy, Studi Kawasan Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia, Bina Budhaya Bandung, 1997, hal 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1835> Tahun 2006 [↑](#footnote-ref-10)
11. Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 18 November 2014 [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.p2par.itb.ac.id/?page\_id=845 [↑](#footnote-ref-12)
13. http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/11/15/mwa9be-indonesiathailand-perkuat-kerja-sama-bilateral akses pada tanggal 9-3-2015 jam 13.30.WIB [↑](#footnote-ref-13)
14. https://www.facebook.com/BukuBahasaThailand/posts/152720614877931 [↑](#footnote-ref-14)